

DAFTAR PUSTAKA

- Chulaemi., Achmad, 1993, Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah dan Pemindahannya, FH – Undip, Semarang.
- Emanuella, 2010, “*Pola Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman*”, Skripsi Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta.
- Firdaos., Awang, 1997. “ Permintaan dan Penawaran Perumahan” Valuestate, Vol. 007, Jakarta.
- Firdaos., Awang, 2005, ” Analisis Pengaruh Jarak ke Jalan Lingkar Luar terhadap Nilai Jual Properti Perumahan di Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta,” Jurnal Survey dan Penilaian, Vol. 001, Jakarta.
- Harsono., Boedi, 2000, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.
- Harsono., Boedi, 2003, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Djambatan, Jakarta.
- Immanuel., Risvy f, 2009, Pedoman Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang, web.unair.ac.id
- Puteri., R P, 2011, “*Tinjauan Model Konsolidasi Tanah Oleh Pengembang Perumahan Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia*”, Skripsi Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM, Yogyakarta.
- Rifat., D, 2004, “*Perkembangan Properti dalam pembangunan Nasional*”, Semarang
- Salindeho., John, 1988, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Cetakan Kedua Sinar Grafika, Jakarta.
- Sitorus., Oloan dan Limbong., Dayat, 2004, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Sumarto, 2010, Kedudukan Hak Ulayat dan Implementasinya Dalam UUPA, BPN RI.
- Sofwan., Sri S M, 1977, *Beberapa Maslah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Bulak Sumur, Yogyakarta.

- Undang-Undang Nomor 5/1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*
- Undang-Undang Nomor 20/1961 tentang *Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda yang ada di atasnya.*
- Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 39/1973 tentang *Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 40/1996 tentang *Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang *Pendaftaran Tanah.Keputusan Presiden No. 55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.*
- Peraturan Presiden Nomor 36/2005 tentang *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.*
- Peraturan Presiden Nomor 65/2006 tentang *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.*
- Instruksi Presiden No. 9/1973 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pencabutan Hak-hak Atas tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.*
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 1/1994 tentang *Ketentuan Pelaksanaan Keppres No. 55/1993.*
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3/1999 tentang *Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.*
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9/1999 tentang *Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Dan Hak Pengelolaan.*